

HUKUM GADAI BERSYARAT MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor
Aceh Singkil)

SKRIPSI

Oleh :

SAHRIANI

NIM: 24.14.3.065



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H

HUKUM GADAI BERSYARAT MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor
Aceh Singkil)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

SAHRIANI

NIM: 24.14.3.065



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H

**Hukum Gadai Bersyarat Menurut Wahbah Az-Zuhaili
(Studi Kasus di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor
Aceh Singkil)**

SKRIPSI

Oleh :

SAHRIANI
NIM. 24. 14. 3. 065

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

Nikmah Dalimunthe, MH
NIB: 1100000117

Mengetahui :
Ketua Jurusan Muamalah
Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA
NIP.19730208199903201

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Hukum Gadai Bersyarat Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 13 November 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Medan, 13 November 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-
SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

Cahaya Permata, MH

NIP. 19861227201503 2 002

Anggota-anggota

1. Dr. Syafrudin Syam, M.Ag

NIP. 19750531 200710 1001

2. Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

3) Nikmah Dalimunthe, MH

NIB. 1100000117

4. Cahaya Permata, MH

NIP. 19861227201503 2 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Dr. Zulham, SHI., M. Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “ **Hukum Gadai Bersyarat Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil)**”. Permasalahan dalam penelitian ini dimana seorang melakukan transaksi akad gadai bersyarat yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu *Murtahin* (orang menerima barang gadai). Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil yang telah melakukan transaksi gadai bersyarat yaitu *ar-Rahin* mensyaratkan apabila utang yang ada telah jatuh tempo utang yang ada belum dibayar maka barang gadaian tidak boleh dijual, apakah sudah sesuai yang telah diatur oleh syari’at khususnya menurut Wahbah Az-Zuhaili. Rumusan Masalah dalam penelitian ini: Bagaimana pelaksanaan gadai bersyarat di desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil, Bagaimana pandangan Wabah Az-Zuhaili terhadap pelaksanaan gadai bersyarat di desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil, Bagaimana pendapat masyarakat di desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil tentang gadai bersyarat. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Karena tipe penelitian yuridis empiris maka metode penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*) dengan penelitian pustaka (*library research*) teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara secara terstruktur. Kemudian setelah diperoleh data-data maka dilakukan analisis deskriptif (*analitical description*). Penelitian yang dilakukan peneliti diketahui bahwa: pelaksanaan gadai bersyarat yang terjadi di Desa Singkohor tidak memenuhi syarat sah gadai menurut Wahbah az-Zuhaili dan transaksi gadai tersebut tidak sah batal akadnya. Terkait dengan gadai, Wahbah az-Zuhaili memberikan pendapat mengenai syarat gadai. Dengan alasan menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Islam wa Adillatuhu tidak boleh dan tidak sah mensyaratkan sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak yang terkait yaitu melakukan akad gadai bersyarat.

Kata kunci: Hukum, Gadai, Bersyarat, Wahbah Az-Zuhaili.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah Swt.

Skripsi ini berjudul Hukum Gadai Bersyarat Menurut Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil) dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- sebesarnnya kepada:

- a. Bapak Prof Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
- b. Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
- c. Ibu Fatimah Zahara, MA, sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- d. Ibu Nikmah Dalimunthe, MH, sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- e. Ibu Fatimah Zahara, MA, sebagai dosen Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan juga sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
- f. Ibu Tetty Marlina SH. MKN, sebagai dosen Sekretaris Jurusan (sektor) Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan..

- g. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
- h. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda (Alamin Bancin) dan Ibunda (Nurbayani). Karena berkat beliau skripsi ini dapat terselesaikan berkat do'a dan kasih sayang serta pengorbanannya ananda dapat menyelesaikan studi sampai kebangku sarjana. Semoga Allah memberikan balasan yang tak terhingga dengan surga yang mulia. Aamiin.
- i. Abangda Nasaruddin, yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat, motivasi dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
- j. Teman-teman seperjuangan Muamalah stambuk 2014-2015, yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
- k. Terima kasih juga kepada abangda Suherman yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- l. Kepada sahabatku Aderina Daulay, Siti Hapsah Hasibuan, Kiki Delfianti, Dini Suhandriani, Fitriani, Nazriani Anaz, SH, yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini.
- m. Terima kasih banyak kepada teman-teman satu asrama, Baini Jarmila, Novimah Emi Mahdiani, Mona Ratu Munthe dan Sari Nurhayani, yang sudah memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.
- n. Terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman yang telah mengucapkan.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang penulis lakukan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Medan, Desember 2019.
Penulis,

SAHRIANI
NIM: 24143065

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|----------------------|---------|
| Persetujuan | i |
| Pengeahan | ii |
| Ikhtisar | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi | viii |
| Daftar Tabel | x |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Kerangka Teoritis | 10 |
| F. Hipotesis | 12 |
| G. Metode penelitian | 12 |
| H. Sistematika Penelitian | 17 |

BAB II TINJAUAN UMUM

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Rahn (Gadai) | 18 |
| 2. Sifat Rahn | 20 |
| 3. Landasan Hukum Rahn (Gadai)..... | 21 |
| 4. Rukun dan Syarat-Syarat Rahn | 25 |
| 5. Pemanfaatan Objek Rahn..... | 37 |
| 6. Berakhirnya akad Rahn | 40 |

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SINGKOHOR

| | |
|---------------------------------|----|
| 1) Letak Geografis | 43 |
| 2) Mata Pencarian | 44 |
| 3) Agama dan Adat Istiadat..... | 45 |
| 4) Tingkat Pendidikan | 47 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili | 50 |
| 2. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Gadai Bersyarat . | 53 |
| 3. Pendapat dan Pelaksanaan Gadai Bersyarat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil | 57 |
| 4. Analisa Terhadap Praktek Gadai Bersyarat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil | 67 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| 1. Kesimpulan | 70 |
| 2. Saran..... | 71 |

DAFTAR PUSTAKA73

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

HASIL WAWANCARA

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|---|----|
| Tabel 1 | Jumlah Penduduk Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Jenis Kelamin | 44 |
| Tabel 2 | Penduduk Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Mata Pencaharian..... | 45 |
| Tabel 3 | Penduduk Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Suku | 47 |
| Tabel 4 | Penduduk Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan satu dengan lainnya. Allah SWT telah mengatur manusia untuk saling tolong-menolong demi tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan bersama.

Mengenai hubungan individu dengan individu lainnya, yakni mengenai hak dan kewajiban, harta, jual-beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, telah diatur dalam fiqh muamalah.¹

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dengan demikian akan dapat digali (hukum dari) berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 1.

kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari masyarakat memerlukan dana yang mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa dihindari. Orang tersebut dapat meminjam uang dengan suatu jaminan barang atas utangnya sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu dapat dikembalikan, inilah dapat disebut dengan *ar-rahn*.²

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *rahn* (Gadai) adalah Penahanan terhadap status barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.³

Kata *Ar-Rahn* menurut bahasa berarti tetap. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang. Pengertian "tetap" dimaksud, makna yang tercangkup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil, karena itu, secara bahasa kata *Ar-Rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat uang.⁴

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajar, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 82

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, Jilid VI (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 107

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

Gadai atau *rahn* juga termasuk akad *tabarru'* (sukarela), upaya menolong dan membantu kesulitan orang lain. Dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Menurut heri sudarsono gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad ar-rahn ialah menjadikan al-'ain (barang) sebagai watsiiqah (jaminan) utang dengan tujuan barang tersebut digunakan untuk membayar hutang (al-marhun bih) ketika pihak yang berhutang tidak bisa membayar hutang.⁵

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶

Menurut Ibnu Munzir berkata: dari kalangan Ulama sepakat bahwa orang yang menjaminkan sesuatu dengan harta, lalu melunasi sebagian hutangnya dan ingin mengambil kembali sebagian harta jaminan, maka itu tidak berhak

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, terj. Jilid VI. h. 106-107

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang Dan Gadai*, cet. Ke II (Bandung: al-Ma'arif, 1993), h. 50

atas itu sebelum ia melunasi yang lain dari hutangnya atau *al-murtahin* (penerima gadai) membebaskannya.⁷

Sedangkan unsur-unsur gadai (*rahn*) adalah orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin*, orang yang menerima (menahan) barang gadai disebut *murtahin*. Barang gadai disebut *Marhun* dan sigat akad. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan kepada yang punya.

Hukum tentang kebolehan gadai ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an surah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنِ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رَءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya: “Wahai kaum mukmin, jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) dan tidak menemukan seorang pencatat utang, hendaklah peminjam memberikan barang jaminan yang dapat dipegang oleh pemberi pinjaman. Akan tetapi, jika kalian saling percaya, hendaklah orang yang dipercaya itu menepati amanat dan hendaklah taat kepada Allah, Tuhannya. Wahai para saksi, janganlah kalian menyembunyikan kesaksiaan kalian. Siapa saja yang menyembunyikan kesaksian, sungguh hatinya telah durhaka.; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah {2}: 283).⁸

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Amzah, 2010), h. 95.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Dana Karya, 2004), h. 50

Sedangkan dalam hadits mengenai *ar-Rahn* ialah:

عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما الى اجل ورهنه درعا من حديد (رواه البخارى ومسلم).⁹

Artinya: “Dari Aisyah r.a. Bahwa Rasulullah SAW., pernah membeli makanan dari seorang Yahudi Secara tidak tunai dan beliau menggadaikan baju besinya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis diatas menjelaskan bahwa seorang dapat menggadaikan barang atau sesuatu miliknya untuk dijadikan jaminan terhadap hutangnya, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.

Dalam masalah Gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama Fiqih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqih. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Orang yang melakukan perjanjian gadai, jika barang yang menjadi objek gadai itu tidak diserahkan maka hukum gadai tersebut menjadi tidak sah. Barang yang digadaikan itu merupakan miliknya sendiri dan jangan pula

⁹ Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jaz V (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), h. 233

merugikan kepada orang yang memberi utang yang dimana orang yang menggadaikan barang mengajukan persyaratan bahwa barang yang digadaikan itu tidak boleh dijual apabila telah jatuh tempo pembayaran, karena hal tersebut dapat merugikan pihak pemberi utang.

Syarat sah gadai adalah syarat yang mengandung kemaslahatan akad, tidak bertentangan dengan apa yang dihendaki oleh akad dan tidak membawa kepada sesuatu yang dibenci oleh syara'. Syarat yang sah adalah seperti mensyaratkan di dalam *ar-Rahnu* bahwa barang yang digadaikan harus ditangan *al-'Adl* satu atau dua atau lebih, atau mensyaratkan yang harus menjual barang yang digadaikan ketika utang yang ada telah jatuh tempo dan pihak *ar-Rahin* belum membayar utang yang ada adalah *al-'Adl*.

Sedangkan syarat yang *fasid* adalah syarat yang bertentangan dengan apa yang dihendaki akad, seperti mensyaratkan barang yang digadaikan tidak boleh dijual ketika utang yang ada telah jatuh tempo.

Berdasarkan praktek gadai bersyarat yang ada di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil adalah sebagai berikut. Dimana sebelum melakukan transaksi gadai pemilik barang gadai (*ar-Rahin*) dan si penerima gadai (*ar-Murtahin*) melakukan perjanjian yang dimana apabila utang yang ada telah jatuh tempo si penggadai memberikan syarat bahwa barang yang ia

gadaikan tidak boleh dijual oleh si penerima gadai (ar-Murtahin). Gadai ini adalah gadai tijarah yang dimana gadai tersebut terdapat tambahan atas utang tersebut.

Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai Gadai bersyarat itu adalah:

الشرط المفسد للعقد وهوان يشترط ما يضر المرتهن كشرط الا يبيعه بعد حلول اجل وفاء الدين الا بعد شهر او الا يبيع باكثر من ثمن المثل¹⁰

Artinya: “Syarat yang tidak sah sekaligus akad ar-Rahnu yang ada ikut menjadi tidak sah. Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak al- Murtahin, seperti mensyaratkan pihak Murtahin tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang yang ada telah jatuh tempo. Sedangkan ar-Rahin pihak ar-Rahin belum juga membayar utang yang ada kecuali setelah satu bulan misalnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas. Bahwa orang yang melakukan gadai bersyarat itu tidak dibolehkan dan tidak sah. Karena gadai bersyarat itu dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu si pemberi utang (al-Murtahin). Dimana orang yang menggadaikan (ar-Rahin) Mensyaratkan apabila utang tersebut belum dilunasi pada saat jatuh tempo maka barang gadaian itu tidak boleh di jual oleh si pemberi utang (al-Murtahin).

¹⁰ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, juz VI (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h.

Realitanya pelaksanaan transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil yang bertolak belakang dengan pendapat Wabah Az-Zuhaili. Masyarakat disana menggadaikan harta itu dengan melakukan atau mengajukan persyaratan yang dapat merugikan pihak pemberi utang (*al-Murtahin*), dalam hal ini gadai bersyarat yang dapat merugikan si pemberi utang tidak sah.

Berdasarkan dalam Al-Qur'an dan hadis ialah sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “ Dan janganlah kamu merugikan sesama manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan dibumi,” (Q.S. Asy-Syu'ara' ayat 183)

Sedangkan dalam hadis yang Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah bersabda:

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط¹¹

Artinya: “Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah maka syarat tersebut batal dan tidak sah meskipun sampai seratus syarat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

¹¹ Muhammad bin Ismail Amir al-Yamani Ash-Shon'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom*, juz V (Arab Saudi: Maktabah Nazar Musthofa Al-Baz, 1995), h. 27

Hadis diatas menjelaskan tidak hanya syarat tersebut saja yang batal dan tidak sah, akan tetapi menurut pendapat yang *azhhar*, akad yang dibarengi dengan syarat seperti itu juga tidak sah dan batal. Karena syarat seperti itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad, sama seperti syarat yang merugikan pihak pemberi utang (al-murtahin).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul penelitian: **“HUKUM GADAI BERSYARAT MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi kasus di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan gadai bersyarat di desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil?
2. Bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap pelaksanaan gadai bersyarat di desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil?
3. Bagaimana pendapat masyarakat di desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil tentang gadai bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan gadai bersyarat yang terjadi di desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil;

2. Untuk menjelaskan pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap pelaksanaan gadai bersyarat di desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil; dan
3. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang gadai bersyarat di desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil;

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi dan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa fakultas syari'ah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya Desa Singkohor tentang hukum gadai bersyarat.

E. Kerangka Teoritis

Rahn merupakan kebutuhan salah satu seorang untuk bermuamalah dengan tunai, manusia yang hampir setiap hari tidak terlepas dari melakukan transaksi gadai dengan orang lain. Dengan demikian, gadai yang dilakukan tertentu harus sempurna rukun dan syarat gadai (*Rahn*) tersebut. Istilah yang digunakan fiqh untuk gadai adalah utang dan disertai dengan jaminan.¹² Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *Marhun*, pihak yang

¹² Ghufuran A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kolektual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 175-176.

menyerahkan jaminan disebut *Rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *Murtahin*.

Pandangan fuqaha' tentang kebolehan gadai didasarkan pada keterangan al-Qur'an dan Hadits, antara lain sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاسٌ عَلَىٰ قَلْبِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣ ﴾

Artinya: “Wahai kaum mukmin, jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) dan tidak menemukan seorang pencatat utang, hendaklah peminjam memberikan barang jaminan yang dapat dipegang oleh pemberi pinjaman. Akan tetapi, jika kalian saling percaya, hendaklah orang yang dipercaya itu menepati amanat dan hendaklah taat kepada Allah, Tuhannya. Wahai para saksi, janganlah kalian menyembunyikan kesaksiaan kalian. Siapa saja yang menyembunyikan kesaksian, sungguh hatinya telah durhaka.; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah {2}: 283).¹³

Rasulullah SAW, bersada:

عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتری من یهودی طعاما الى اجل ورهنه درعا

من حدید¹⁴

Artinya: “Dari Aisyah r.a. Bahwa Rasulullah SAW., pernah membeli makanan dari seorang Yahudi Secara tidak tunai dan beliau menggadaikan baju besinya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 50.

¹⁴ Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jaz V (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), h. 233

Mengenai *al-Marhun* (Gadai bersyarat) pada dasarnya menurut syafi'iyah bahwasanya tidak boleh menggadaikan harta dengan menggunakan atau mengajukan persyaratan.

F. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan terdahulu, maka gadai dengan menggadaikan sesuatu barang yang dimana pihak pemberi gadai mengajukan persyaratan yang dapat merugikan salah satu pihak (penerima gadai) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.¹⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis atau spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan di masyarakat terkait pelaksanaan gadai. Karena jenis

¹⁵ Cholid Nur Boko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka), h. 1.

penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) yang digunakan untuk menggali literatur-literatur yang terkait dengan hukum gadai bersyarat.

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang hukum gadai bersyarat menurut Wahbah az-Zuhaili. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengetahui dan menelaah kasus-kasus tentang hukum gadai bersyarat.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data sekunder sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library study*), baik dalam bentuk bahan hukum premier, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier sebagai data utama atau

data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan,¹⁶ yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari hukum Islam yang terkait obyek penelitian yaitu antara lain:

5. Kitab Wahbah az-Zuhaili al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu
6. Hasil wawancara dengan beberapa orang yang melakukan akad gadai bersyarat.

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 5) Buku-buku teks dari para ahli hukum,
- 6) Bahan-bahan hukum kuliah,
- 7) Artikel hukum.

a. Hasil-hasil penelitian

c) Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum tersier terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 113.

Dalam penelitian ini menggunakan teknis pengumpulan data dengan metode pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengecekan ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis yang berbentuk buku, dokumen pribadi, yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara *kualitatif* yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan.¹⁷

Penelitian ini menggunakan cara berfikir *deduktif*. *Deduktif* yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam Al Qur'an dan as Sunnah terhadap gadai bersyarat di desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil.

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan penelitian ini agar lebih memudahkan para pembaca memahami masalah-masalah yang akan dibahas dalam pembahasan skripsi ini maka penulis menjadikan pembahasan yang dibagi kepada lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematis Pembahasan.

BAB II: Pada bab ini penulis membahas: Pengertian Gadai (*Rahn*), Sifat Rahn, Landasan Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Gadai, Pemanfaatan Gadai dan berakhirnya Akad Gadai.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987), h. 42.

BAB III: Membahas Letak Geografis dan Gambaran Umum di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil

BAB IV: Penulis Membahas Tentang riwayat hidup Wahbah Az Zuhaili, pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Hukum Gadai Beryarat, Pendapat dan pelaksanaan Gadai Bersyarat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Analisis terhadap praktek Gadai bersyarat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil.

BAB V: Penutup, Bab ini Berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RAHN (GADAI)

A. Pengertian Rahn (Gadai)

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Ar-rahn (gadai) dalam bahasa Arab berasal dari kata رهن - رهنا - يرهن yang berarti menggadaikan, menanggukkan, jaminan utang dan gadaian. Menurut bahasa, *ar-rahn* (gadai) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan, ada pula penjelasan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.¹⁸

Ar-rahn secara bahasa artinya bisa *ats-tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap), dikatakan, “*maaun raahinun* (air yang diam, mengenang, tidak mengalir)

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 105.

“*haalatun raahintun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-habsu* dan *al-luzuum* (menahan).¹⁹

Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima.

Sedangkan definisi *rahn* menurut syara’ adalah:

والرهن شرعا: حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه.²⁰

Artinya: “*Ar-Rahn* menurut Syara’: Penahanan terhadap status barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”.

Menurut kalangan ulama Syafi’iyah *ar-rahn* adalah :

جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 106.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz V, h. 183.

Artinya : Menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.²¹

Masalah gadai dapat dikatakan bahwa *rahn* (gadai) adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas utang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan utang tersebut belum terbayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang. Gadai juga dapat diartikan dengan akad seseorang yang mempunyai utang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya sebagai jaminan atas utang tersebut hingga ia melunasi utangnya secara keseluruhan.

B. Sifat Rahn

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.²²

²¹ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 199.

Ar-rahnu termasuk salah satu akad *al-'aini*, yaitu akad yang dianggap belum sempurna sehingga konsekuensi-konsekuensi hukumnya belum bisa dijalankan kecuali jika *al-'ain* atau barang yang menjadi objek akad telah diserahkan. Akad *al-'aini* ada lima, yaitu hibah, *i'aarah* (peminjaman), *lidaa'* (titipan), *al-Qardh* (pinjaman utang) dan *ar-rahn* (gadai). Sebab kenapa *al-qabdh* (*al'ain* atau barang yang menjadi objek sudah di pegang dan berada di tangan pihak kedua) termasuk salah satu syarat agar akad-akad tersebut dianggap telah sempurna dan memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum adalah karena akad-akad tersebut adalah akad *tabarru'* (mengandung unsur derma), sementara kaidah fiqh menegaskan bahwa *at-tabrru'* atau derma belum dianggap sempurna dan memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum kecuali dengan adanya *al-Qabdhu* (serah terima barang yang menjadi objek akad).²³

C. Landasan Hukum Rahn (Gadai)

Menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam *safar* (perjalanan). Hukum ini disepakati oleh ulama *mujtahidin*.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 160

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, terj. h. 108

Jaminan itu tidak kecuali dengan *ijab* dan *qabul*. Dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada ditangan yang berpiutang maka hukumnya boleh. Dan jika keduanya sepakat barang jaminan itu berada ditangan seorang adil, maka hukumnya juga boleh. Dan jika keduanya masing-masing menguasai sendiri maka hakim menyerahkan kepada orang yang adil, semua barang (benda) yang boleh dijual boleh pula dijaminan.²⁴

Ar-Rahn (gadai) hukumnya diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an As-sunnah dan Ijma', yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝²⁵

Artinya: “Wahai kaum mukmin, jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) dan tidak menemukan seorang pencatat utang, hendaklah peminjam memberikan barang jaminan yang dapat dipegang oleh pemberi pinjaman. Akan tetapi, jika kalian saling

²⁴ Hafid Abdullah, *Kunci Fikih Syafi'i* (Semarang: CV As-Syifa', 1992), h. 144

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Dana Karya, 2004), h. 50.

percaya, hendaklah orang yang dipercaya itu menempati amanat dan hendaklah taat kepada Allah, Tuhannya. Wahai para saksi, janganlah kalian menyembunyikan kesaksiaan kalian. Siapa saja yang menyembunyikan kesaksian, sungguh hatinya telah durhaka.; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [QS. Al-Baqarah [2]: [283].

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (borg) oleh pihak yang berpiutang digunakan sebagai jaminan.²⁶ karena gadai tidak bisa terjadi sebelum serah terima barang karena ia merupakan akad saling membantu dan menolong yang membutuhkan serah terima.

b. As-Sunnah

4) Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما الى اجل ورهنه درعا من حديد (رواه البخارى ومسلم).²⁷

²⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 125.

²⁷ Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jaz V (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), h. 233.

Artinya: “Dari Aisyah r.a. Bahwa Rasulullah SAW., pernah membeli makanan dari seorang Yahudi Secara tidak tunai dan beliau menggadaikan baju besinya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits di atas bahwa transaksi gadai itu dibolehkan karena transaksi gadai bertujuan untuk kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam kerangka hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Serta dari hadits di atas Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya karena keadaan ekonominya saat itu masih dalam kesulitan serta adanya tanggungan yang sangat banyak.

5) Hadits Riwayat Dar al-Qutni

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه²⁸

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., bahwasannya Rasulullah SAW., berkata: barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian (atau biaya). (HR. Dar al-Qutni).

²⁸ Al-Asqalani Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Halabiy, 752 H), h. 181.

Berdasarkan ayat dan hadits-hadits tersebut di atas bahwa gadai dibolehkan, demikian pula para ulama bersepakat mengenai kebolehan gadai karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dan gadai juga bermaslahat bagi orang yang melakukan atau dalam sedang perjalanan ataupun yang berada di rumah. Transaksi gadai boleh dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *ar-rahn* (gadai).

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *rahn* (gadai) boleh dilakukan, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kebolehannya.²⁹

D. Rukun dan Syarat *ar-rahn* (gadai)

7. Rukun *ar-Rahn* (Gadai)

Ar-rahnu memiliki empat unsur atau elemen, yaitu *ar-Rahin* (orang yang menggadaikan), *al-Murtahin* (orang yang menerima gadai), *al-Marhun* atau *ar-Rahnu* (barang yang digadaikan), *al-Marhun bihi* (*ad-Dain* atau tanggungan utang pihak *ar-Rahin* kepada *al-Murtahin*).³⁰

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar as-Saqafah al-Islamiyah, t.th), h. 131.

Sedangkan rukun rahn ada tiga menurut ulama Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi adalah:

أركان الرهن ثلاثة:

1. عاقد ويشمل الطرفين : الراهن وهو المالك والمرتحن وهو صاحب الدين في نظير دينه.

2. ممقود عليه ويشتمل أمرين : العين المرهونة والدين المرهون به.

3. الصيغة إلا أن أبا حنيفة لم يجعل الرهن إلا ركنا واحدا وهو الإيجاب والقبول لأنه هو حقيقة العقد, وأما غيره فهو خارج عن ماهيته كما جاء ذلك في البيع.³¹

Rukun ada 3 (tiga) yaitu:

2. Orang yang berakad: penggadai adalah pemilik dari barang gadaian yang mana ia adalah memberikan utang dari barang yang digadaikannya.
3. Penerima gadai terbagi atas dua perintah: adanya barang yang digadaikan dan utang dari barang gadaian.
4. Shighat, Abu Hanifah belum menjadikan untuk gadai kecuali hanya satu rukun ialah *ijab* dan *qabul* karena itu adalah sebenar-benar akad, yang mana gadai tersebut berbeda dengan jual beli.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Jilid VI. h. 111

³¹ Imam An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Sarah Majahib*, Jilid XII, t.th. h. 302

8. Syarat-syarat ar-Rahn (gadai)

Syarat Rahn ada tiga menurut ulama Syafi'iyah yaitu Imam An-Nawawi adalah:

وقد قسم أصحاب أب حنفة شروط الرهن إلى ثلاثة أقسام:

1. شرط انعقاد

2. شرط صحة, ويسمى شرط الجواز

3. شرط لزوم.³²

Sahabat Abu Hanifah telah membagi syarat gadai menjadi tiga bagian:

1. Syarat akad
2. Syarat sah atau syarat kebolehanannya
3. Syarat untuk membolehkannya.

Mengenai syarat-syarat tersebut di atas adapun yang menjadi syarat sempurnanya akad *rahn*, ialah:

- a. Para ulama sepakat bahwa *murtahin* di perbolehkan memegang barang gadaian atas seizin *rahin*, baik secara jelas maupun petunjuk.
- b. *Rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad

³² Ibid. h. 303

- c. *Murtahin* harus memegang *rahn*.

Para ulama Fiqh mengemukakan syarat-syarat dari rukun *rahn* sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad (*Rahin* atau *Murtahin*)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* mengemukakan bahwa syarat *rahn* ialah:

- a) *Rahin* (penggadai) memiliki kelayakan, kepantasan, dan mampu untuk melakukan transaksi gadai,
- b) *Rahin* (penggadai) tidak terpaksa untuk menggadaikan harta atau barang yang akan digadaikan,
- c) *Rahin* (penggadai) memiliki harta atau barang gadai milik sendiri (kelayakan dalam harta), dan dapat melakukan perbuatan hukum (*at-tasharruf*),
- d) *Rahin* (penggadai) bukan termasuk orang yang bodoh, dibawah umur, gila, boros dan pailit. Serta tidak sah gadai dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau hakim kecuali karena keadaan darurat atau karena kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna *ahliyah*-nya (*qashif*).³³

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Jilid VI. h. 121-122

Sedangkan syarat *murtahin* (penerima harta atau barang gadai) adalah:

- a) *Murtahin* tidak dalam keadaan terpaksa melakukan transaksi gadai
- b) *Murtahin* dapat menjaga dan menahan harta atau barang gadai dengan baik, bertanggung jawab atas harta atau barang gadai yang diterima
- c) *Murtahin* merupakan orang yang mampu dan mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi.

2. Syarat *al-Marhun* (barang yang digadaikan)

Al-Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagai persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Adapun syaratnya antara lain:

- a) Barang jaminan itu boleh diperjual-belikan dan nilainya seimbang dengan utang,
- b) Barang jaminan itu bernilai harta dan tidak boleh dimanfaatkan,
- c) *Marhun* (barang gadai) harus jelas,
- d) Barang jaminan milik sah *rahin* (penggadai),
- e) Barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain, dan

- f) Barang jaminan berupa harta yang utuh dan dapat diserahkan pada waktu akad dan kemudian dipegang oleh yang menerima agunan dan barang jaminan boleh diserahkan baik materi maupun manfaat.

Berdasarkan syarat-syarat diatas, para ulama sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu boleh dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, syarat yang terakhir (kesempurnaan *rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabah al-Marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), syarat ini menjadi penting karena Allah menyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 283.³⁴

3. Syarat Sighat

Ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam akad *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini disebabkan *rahn* itu menyerupai akad jual-beli. Maka apabila *rahn* dikaitkan dengan sesuatu atau memakai syarat tertentu, maka akad rahnnya fasid, seperti halnya dalam jual-beli.

³⁴ Abu Ahmad najieh, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, cet. 1, (Bandung: Marja, 2017), h. 236

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama seperti syarat jual beli, karena gadai merupakan akad *amaliyah*. Syarat *shighat* ialah lafaz, yakni pernyataan gadai, lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang di dalamnya terkandung maksud perjanjian gadai diantaranya para pihak.

Mengenai perjanjian gadai terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian tersebut, maka dari itu dalam pernyataan *shighat* harus diketahui dan disaksikan oleh pihak yang melakukan akad. Jika diantara pihak yang melakukan transaksi tidak ketahui adanya perjanjian mengenai barang yang digadaikan, maka transaksi tersebut tidak sah. Karena sahnya suatu akad gadai yaitu apabila adanya penguasaan barang dan pernyataan dari para pihak dalam mengadakan perjanjian.

Menurut ulama dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat *rahn* itu dapat dikelompokkan dalam tiga syarat sebagai berikut:

- a) Syarat sah, yaitu mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar utangnya sehingga jaminan tidak disita,
- b) Syarat batil, yaitu mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya

diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah,

- c) Syarat merusak akad, yaitu mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.³⁵

4. *Syarat Marhun bih* (utang)

Marhun bih (utang) merupakan hak atas gadai berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan. Adanya utang tersebut bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba. Kalangan ulama Syafi'iyah memberikan syarat-syarat terhadap *marhun bih* yaitu:

- a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemegang gadai,
- b. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan,
- c. Utang harus lazim pada waktu akad,
- d. Utang itu boleh dilunasi dengan agunan (barang jaminan) tersebut,
- e. Utang harus jelas dan tertentu, dan
- f. Utang harus diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.³⁶

³⁵ Syihabuddin ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 254

Marhun bih (utang) timbul karena adanya transaksi gadai yang dilakukan para pihak, utang yang didapatkan dari pihak yang memberi gadai untuk mendapatkan pembayaran tunai dengan adanya barang miliknya yang dijadikan sebagai jaminan. Apabila pihak yang menerima utang gadai tidak dapat membayarkan utangnya maka barang miliknya tidak dapat di ambil sebelum ia melunasi utangnya.

5. Syarat kesempurnaan *rahn*

Secara umum para ulama fiqh sepakat bahwa memegang atau menerima barang gadai adalah syarat dalam *rahn*. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT., sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..." [QS. Al-Baqarah: 2/283].

³⁶ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 248.

Mengenai pendapat, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (*rahn*) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan.

Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (*al-qabdu*) bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya jika *rahin* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rahin* tidak boleh membatalkan secara sepihak.³⁷

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa di antara syarat memegang, *murtahin* harus tetap atau lama memegang jaminan. Dengan demikian, menurut ulama Malikiyah dan hanafiyah, *rahn* batal jika *murtahin* meminjamkan atau menitipkan jaminan kepada *rahin*. Adapun menurut ulama Hanabilah, akad *rahn* tidak batal, tetapi hilang kelazimannya dan akan menjadi lazim kembali jika *rahn* mengembalikannya kepada *murtahin*.³⁸

³⁷ Rachmat Syafe'I, *fiqih Muamalah*, h. 165.

³⁸ Ibid. h. 166.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau meminjamkan jaminan kepada *rahin*, seperti untuk memanfaatkan.

Beberapa Ketentuan Hukum *rahn*:

Beberapa ketentuan hukum *rahn*, yakni sebagai berikut:

1. Barang yang digadaikan harus berada di bawah tangan (kekuasaan) *murtahin* (penerima gadaian) dan bukan ditangan *rahin* (orang yang menggadaikan). Jika *rahin* memintanya dari *murtahin*, maka hal itu tidak dibolehkan baginya. Sedangkan jika *murtahin* Mengembalikannya atas kehendaknya sendiri, maka itu adalah haknya.
2. Barang yang tidak sah dijual, tidak sah digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan yang belum matang, karena menjual keduanya dalam keadaan belum matang diharamkan, dan menggadaikan keduanya diperbolehkan dengan alasan bahwa didalamnya tidak mengandung unsur penipuan terhadap *murtahin*, karena utangnya masih tetap jadi tanggungan, meskipun tanaman buah-buahan yang digadaikan mengalami kerusakan.

3. Jika waktu penggadaian habis, maka *murtahin* berhak menagih utang kepada *rahin*. Jika melunasinya, maka barang gadai harus dikembalikan kepadanya. Sedangkan jika *rahin* tidak mampu melunasi utangnya, maka *murtahin* berhak menjualnya. Jika harganya melebihi utang *rahin*, maka *murtahin* harus mengembalikan lebihnya kepada *rahin*. Tetapi jika harga penjualannya tidak dapat melunasi utang *rahin*, maka kekurangannya merupakan tanggungan *rahin*.
4. Barang gadai merupakan barang amanat yang berada di bawah kekuasaan *murtahin*, sehingga apabila barang tersebut rusak karena kecerobohan atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia harus bertanggung jawab apapun, dan utang masih tetap tanggungan *rahin*.
5. Barang gadaian boleh disimpan pada seseorang selain *murtahin* yang bisa dipercaya. Karena tujuan penyimpanan itu akan tercapai pada seseorang yang dapat dipercaya.

6. Jika *rahin* mensyaratkan tidak menjual barang gadaian setelah jatuh tempo penembusannya (pembayaran utang), maka akad *rahn* di hukuminya batal (tidak sah).³⁹

7. Akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *Murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.⁴⁰

E. Pemanfaatan Objek Rahn (Gadai)

Para ulama berbeda pendapat tentang pemanfaatan *marhun* (barang gadai) atas jaminan. Secara garis besar perbedaan tersebut terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:

1. Apabila barang (jaminan) ditangan *rahin*.

Sebagian ulama melarang *rahin* untuk memanfaatkan barang jaminan dan sebagian ulama lainnya membolehkan dengan tidak memudharatkan *murtahin*,

Sementara menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan untuk memanfaatkan barang jaminan maka akad menjadi batal.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk

³⁹ Syekh Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, cet. VI (Madinah: Maktabatul 'Ulum wa Hikam, 1419), h. 596.

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 392.

memanfaatkan barang jaminan. Apabila tidak menyebabkan barang jaminan berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *murtahin*, seperti mengendarinya, menempatkannya, dan sebagainya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang jaminan berkurang, seperti sawah dan kebun *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

2. Apabila barang (jaminan) ditangan *murtahin*.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa barang jaminan harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini juga disepakati oleh ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam barang jaminan pada dasarnya termasuk *rahn* (gadai).

Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan barang jaminan sekedarnya (tidak boleh lama) atas tanggungan *rahin*. Sebagian ulama malikiyah berpendapat, jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan barang jaminan, ia harus membayarnya.⁴¹

Apabila dalam akad, penerima gadai mensyaratkan agar manfaat barang gadai kembali kepadanya, maka akadnya *fasid* (rusak) atas orang yang

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 173.

menggadaikannya. Tetapi menurut suatu pendapat (*qil*): bahwa yang rusak adalah syaratnya, sedangkan akadnya sah. Dalam keadaan bagaimana pun penerima gadai tidak boleh mengambil mengambil manfaatnya barang gadai, bila ia mensyaratkan dalam akadnya, sebaliknya apabila sebelum akad orang yang menggadaikan sudah memperkenalkan kepada penerima gadai untuk mengambil manfaat gadai yang akan digadaikan, maka penerima gadai diperbolehkan mengambil manfaat barang gadai sesudah akad.⁴²

Mengenai barang gadai pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang (pemberi gadai) tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum.

Apabila disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang jaminan, maka hukumnya haram dan merupakan riba. Ulama Hanabilah berpendapat jika barang jaminan berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkannya seperti mengendarainya atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun

⁴² Moh. Zuhri, Dkk, *Fikih Empat Majhab*, cet.I (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h. 642.

tidak diizinkan oleh *rahn*. Adapun barang jaminan selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahn*.

F. Berakhir akad rahn (gadai)

Menurut Sayid Sabiq, jika barang gadai kembali ke tangan *rahn* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahn*, maka ketika itu gadai sudah batal.⁴³

Barang gadai adalah amanah yang ada ditangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta ganti rugi kecuali jika melewati batas waktu. Akad gadai berakhir dikarenakan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila sesudah transaksi, *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) belum menerima barang gadai,
- b. Sesudah jatuh tempo *murtahin* membuat persyaratan yang memberatkan *rahn* (orang yang menggadaikan barang), misalnya: barang harus ditebus dengan harga yang mahal dikarenakan perawatannya yang mahal (ini di luar kesepakatan akad),

⁴³ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, cet.8 (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), h. 190

c. Apabila *murtahin* mengambil hasil atau manfaat dari barang gadaian *rahin*. Dalam hal ini murtahin mensyaratkan agar *rahin* memberi izin mengambil manfaat barang gadai, misalnya:

- 1) Apabila digadaikan sepetak kebun dengan syarat buah yang dihasilkan juga termasuk dalam gadai,
- 2) Apabila digadaikan sebidang tanah dengan syarat semua pohon yang ditanamkan adalah termasuk barang gadaian,
- 3) Apabila digadaikan seorang budak lalu budak itu disewakan murtahin keorang lain,
- 4) Apabila digadaikan sebuah rumah lalu rumah disewakan oleh murtahin guna mengambil keuntungan dari barang gadai itu (rumah).

d. Kecacatan pada barang,

e. Pembebasan utang

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan selesinya gadai meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

f. *Rahin* meninggal,

Menurut ulama Malikiyah, gadai berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan barang (jaminan) kepada *murtahin*, serta gadai

batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan jaminan kepada *rahin*.

g. Ditasarufkan.

Rahin dipandang berakhir apabila barang jaminan ditasarufkan, seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah dan sebagainya atas izin pemiliknya.⁴⁴

⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid III, t.th. h. 180.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SINGKOHOR

KECAMATAN SINGKOHOR ACEH SINGKIL

A. Letak Geografis

Desa Singkohor adalah salah satu bagian daerah Aceh Singkil Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, provinsi Aceh, Indonesia.

Letak geografis Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mukti Jaya
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lae Pinang
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lae Sepola
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mukti Harapan⁴⁵

Mengenai luas wilayah Desa Singkohor adalah 18.000 Ha. Jumlah penduduk Desa Singkohor kecamatan Singkohor 1.913 jiwa, yang terdiri dari 557 KK (Kepala Keluarga). Selengkapnya jumlah penduduk tersebut dapat dilihat tabel beriku ini:

⁴⁵ Sumber Data Statistik Desa Singkohor kecamatan Singkohor Tahun 2019.

Tabel 1.

Jumlah penduduk Desa Singkohor kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan jenis kelamin.

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Perempuan | 941 | 47,41% |
| 2 | Laki-laki | 972 | 52,59% |
| Jumlah | | 1913 | 100% |

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Singkohor Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, jumlah laki-laki dan perempuan seimbang, di mana jumlah laki-laki 972 jiwa (52,41%) dan perempuan 941 jiwa (47,41%).

B. Mata Pencaharian

Ekonomi merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Singkohor Kecamatan Singkohor menekuni berbagai macam jenis profesi. Sebagian masyarakat ada yang berprofesi sebagai petani, buruh, pegawai, pedagang dan sebagainya. Penduduk Desa Singkohor memiliki beberapa bidang mata pencaharian yang diuraikan penjelasannya di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Penduduk Desa singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan Mata pencaharian:

| No | Mata Pencaharian | Jumlah | Persentase |
|-----------|-------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Petani | 592 | 39,54% |
| 2 | Pns | 37 | 1,49% |
| 3 | Pedagang | 84 | 2,97% |
| 4 | Tidak/belum Bekerja | 1.200 | 56% |
| Jumlah | | 1.913 | 100% |

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Singkohor Tahun 2019

Berdasarkan perincian mata pencaharian penduduk Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil pada tabel di atas, tampak yang lebih dominan mata pencahariannya adalah petani.

C. Agama dan Adat Istiadat

Agama pada prinsipnya mengatur kedua hubungan yang saling berkaitan erat, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT., dan hubungan manusia dengan sesama manusia (*Hablumminallah wa habluminannas*) sehingga Agama

Islam memberikan sesuatu kemaslahatan aau kebaikan bagi setiap manusia itu sendiri, dan Agama Islam adalah merupakan keyakinan yang luhur.⁴⁶

Desa Singkohor kecamatan Singkohor merupakan desa yang penduduknya 100% adalah beragama Islam. Dengan demikian, di desa tersebut tidak ada warga yang beragama Kristen, Hindu, maupun Budha.

Beberapa keberagaman suku dan adat istiadat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Namun, dengan itu tidak menjadikan masyarakat Desa Singkohor terpecah belah menjadi berkelompok-kelompok, melainkan mereka tetap satu dan rukun serta saling hormati-menghormati antara satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui suku-suku yang terdapat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

⁴⁶ Syekh Abdullah Azis Syawisy, *Islam Agama Yang Fitrah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1.

Tabel 3.

Penduduk Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan suku.

| No | Suku | Jumlah | Persentase. |
|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| 1 | Jawa | 1.438 | 75% |
| 2 | Pakpak Boang | 475 | 25% |
| Jumlah | | 1.913 | 100% |

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Singkohor Tahun 2018

Berdasarkan adat istiadat kebiasaan masyarakat Desa Singkohor Desa Singkohor sangat kental misalnya pernikahan, dalam pernikahan kebiasaan masyarakat Desa Singkohor bagi mempelai pria membawa mempelai perempuan ke rumah mempelai pria sehari (menjalang) kemudian di bawa kembali oleh mempelai pria ke rumah mempelai perempuan dan lagi kebiasaan masyarakat Desa Singkohor ketika Tolak Bala semua masyarakat melakukan ritual kirim doa di tepi sungai, hal ini diyakini masyarakat Desa Singkohor dapat menjauhkan segala Bala (musibah) atau bencana.

D. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sebab pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat

memberikan masa depan yang cerah bagi manusia, sebab pendidikan merupakan pintu untuk menuju kesuksesan di dunia maupun di akhirat yang Insyallah semuanya bisa tercapai dengan pendidikan.

Perhatian Negara Rebuplik Indonesia terhadap dunia pendidikan dapat dilihat melalui penjelasan undang-undang sistem pendidikan nasional No 20 tahun 2003 dalam pasal 3 yaitu: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta beradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴⁷

Selanjutnya data jumlah indivindu untuk tingkat pendidikan masyarakat Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil yang memulai awal pendidikannya dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai pada yang bergelar Sarjana.

⁴⁷ Pasal 3 undang-undang Nomor 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional (Jakarta: CV. Medya Duta, 2003), h. 5.

Tabel 4.

Penduduk Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|-----------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Taman Kanak-Kanak (TK) | 90 | 5,60% |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 210 | 13,18% |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 320 | 19,77% |
| 4 | Sekolah Menengan Atas (SMA) | 315 | 19,11% |
| 5 | Akademi /D1-D3 | 65 | 3,30% |
| 6 | Stata -1 | 80 | 4,94% |
| 7 | Tidak/Belum Sekolah | 833 | 34,10% |
| Jumlah | | 1.913 | 100% |

Berdasarkan tabel di atas ditinjau dari tingkat pendidikan maka yang paling banyak di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil adalah yang tidak/belum sekolah mencapai 34,10%.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK RAHN DI DESA SINGKOHOR DITINJAU MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

1. Kelahiran dan Kepribadianya

Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan pada Tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan faiha, provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah Az-Zuhaili bin Mustafa al-Zuhaili. Yakni seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.⁴⁸ Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tharir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayid Qutb,

⁴⁸ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Saltut, Ali Muhammad al-Khafif , Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.⁴⁹

Mengenai kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan Masyarakat syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, disamping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya, tetapi bersikap netral dan profesional.

2. Pendidikan dan Gelar yang Disandangnya

Berdasarkan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 Tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah Ibtidaiyyah di kampungnya hingga sampai pada Tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 Tahun beliau menghabiskan pendidikan jenjang menengahnya, dan pada Tahun 1952 beliau mendapatkan izajah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan keperguruan tinggi yaitu Fakultas Syariah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya Pada Tahun

⁴⁹ Lisa Rahayu, “*Makna Qoulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az-Zuhaili*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Usuluddin Universitas Uin Suska Riau, Pekanbaru, 2010), h. 18.

1953 M. Kemudian untuk melanjutkan, untuk melanjutkan study doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada Tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*.

3. Karya-karyanya

Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Berdasarkan sisi lain beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibubukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

- a. *Atsar al-Harb al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
- b. *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus 1966.
- c. *al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
- d. *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyyah*, Maktabag al-Farabi, Damaskus, 1969.
- e. *Nazariat al-Daman*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970.
- f. *Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
- g. *Al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
- h. *Al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.
- i. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.
- j. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
- k. *Fiqh al-Mawaris al-Shari'ah al-Islamiah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.

B. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukum Gadai Bersyarat

Dalam bermuamalah masyarakat tidak terlepas dari hidup bersosial, masalah muamalah selalu dan terus berkembang. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ada yang memerlukan dana mendesak, seperti pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bias dihindari. Orang tersebut dapat meminjam uang dengan suatu jaminan barang atas

utangnya sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan, inilah yang dapat disebut dengan akad *rahn*.⁵⁰

Gadai adalah suatu perjanjian yang menjadikan harta benda bernilai ekonomis sebagai jaminan atas utang dan jaminan tersebut dijadikan sebagai keyakinan bahwa uang yang dipinjamkan akan dikembalikan.

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan masyarakat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil adalah melakukan transaksi gadai. Gadai yang dilakukan sebagian masyarakat tersebut adalah melakukan akad gadai bersyarat.

Adapun hukum gadai bersyarat menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili adalah sebagai berikut:

الشرط المفسد للعقد وهوان يشرط ما يضر المرتهن كشرط الا يبيعه بعد حلول اجل وفاء الدين الا بعد شهر او الا يبيع باكثر من ثمن المثل⁵¹

Artinya: “Syarat yang tidak sah sekaligus akad ar-Rahnu yang ada ikut menjadi tidak sah. Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak al- Murtahin, seperti mensyaratkan pihak Murtahin tidak boleh

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajar, Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 82.

⁵¹ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, jujud VI* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 120.

menjual barang yang digadaikan setelah utang yang ada telah jatuh tempo. Sedangkan pihak ar-Rahin belum juga membayar utang yang ada kecuali setelah satu bulan misalnya.

Berdasarkan pendapat Wahbah az-Zuhaili di atas penulis simpulkan bahwa transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil tidak sah karena *Rahin* (orang yang menggadaikan) melakukan gadai bersyarat yang dapat merugikan si *Murtahin* (orang menerima barang gadai).

Mengenai gadai bersyarat maka dalam hal ini jika ditinjau menurut Wahbah az-Zuhaili hukumnya tidak sah karena pihak penggadai mengajukan syarat bahwa apabila utang yang ada telah jatuh tempo maka barang gadaian tidak boleh di jual oleh si penerima gadai. Dalam hadis yang Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah bersabda:

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط⁵²

Artinya: “Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah maka syarat tersebut batal dan tidak sah meskipun sampai seratus syarat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

⁵² Muhammad bin Ismail Amir al-Yamani Ash-Shon’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom*, juz V, h. 27

Hadis di atas menjelaskan tidak hanya syarat tersebut saja yang batal dan tidak sah, akan tetapi menurut pendapat yang *azhhar*, akad yang dibarengi dengan syarat seperti itu juga tidak sah dan batal. Karena syarat seperti itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad, sama seperti syarat yang merugikan pihak pemberi utang (al-murtahin).

Akan tetapi di karenakan kurangnya ilmu pengetahuan maka transaksi gadai yang tidak sesuai menurut Wahbah az-Zuhaili dan Syari'at Islam masih terjadi di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Maka dari itu, menurut penulis perlu dilakukan usaha-usaha penyuluhan hukum muamalah khususnya mengenai *rahn* (gadai) yang sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Syari'at Islam agar kedepannya masyarakat tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam bermuamalah khususnya dalam masalah *rahn* (gadai).

Masyarakat Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil melakukan transaksi gadai yang dapat merugikan si penerima barang gadai (*Murtahin*) menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili. Masyarakat Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil tidak mengetahui bahwa akad gadai bersyarat yang telah mereka lakukan tidak sah.

Sebagaimana menurut Wahbah az-Zuhaili mengenai akad gadai bersyarat yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu *Murtahin* (orang yang menerima gadai). Akan tetapi masyarakat Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil dapat mengetahui bahwa akad gadai bersyarat tidak sah dan tidak boleh dilakukan akad gadai tersebut, karena setelah adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis.

C. Pendapat dan Pelaksanaan Gadai Bersyarat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa gadai merupakan kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sebab dengan akad gadai manusia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder termasuk apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Singkohor.

Realita yang terjadi di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan gadai yang banyak dilakukan kalangan masyarakat, ada terdapat beberapa orang yang melakukan transaksi gadai dengan akad gadai bersyarat.

Mengenai gambaran praktek gadai bersyarat dapat dikemukakan sebagai berikut: seperti si A mengadaikan barang berupa emas 5 gram kepada si B kemudian si A membayar dengan secara kredit/cicil. Dalam praktek gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sesuai, dikarenakan salah satu pihak (*rahin*) meminta syarat kepada pihak *murtahin* untuk tidak menjual barang gadai, namun pada dasarnya pembayaran gadai tersebut sudah habis jatuh tempo pembayaran. Untuk lebih jelasnya bagaimana pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil dapat diuraikan sebagai berikut.

Kasus pertama: hasil wawancara dengan bapak Rudi sebagai *Rahin* (yang berhutang) dengan usia 45 Tahun yang bertempat tinggal di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Bapak Rudi yang telah melakukan akad gadai bersyarat kepada bapak Muslim sebagai *Murtahin* (penerima barang) dengan usia 43 Tahun yang bertempat tinggal di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, dan transaksi gadai tersebut dimulai sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 dan bapak Rudi meminjam uang kepada bapak Muslim sebesar Rp 6.000.00,-.

Berdasarkan sistem pengembalian atau pembayaran pinjaman gadai tersebut dengan cara cicil selama 7 bulan. Barang sebagai jaminan utang tersebut berupa emas 10 Gram. Pada transaksi akad gadai ini bapak Rudi melakukan akad gadai bersyarat yaitu apabila utang ada telah jatuh tempo pembayaran emas 10 Gram tersebut tidak boleh dijual.

mengenai transaksi gadai ini bapak Muslim sebagai orang yang menerima barang gadaian merasa dirugikan karena bapak Rudi pada masa pembayarannya lewat dari tanggal yang telah ditentukan selama 2 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak orang yang melakukan transaksi gadai yaitu bapak Muslim sebagai pihak *murtahin* (orang yang menerima barang gadai). Ia mengatakan bahwa ia merasa dirugikan dengan transaksi akad gadai bersyarat tersebut.⁵³

Kasus kedua: Hasil wawancara dengan ibu Mawar sebagai *Rahin* (yang berhutang) dengan usia 38 Tahun yang bertempat tinggal di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Ibu Mawar yang telah melakukan akad gadai bersyarat kepada ibu Mardiani sebagai *Murtahin* (penerima barang) dengan usia 37 Tahun yang bertempat tinggal di Desa

⁵³ Bapak Muslim, Pihak yang menerima gadai (*Murtahin*), Wawancara Pribadi 09.30 WIB, Desa Singkohor 1 Oktober 2019.

Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, dan transaksi gadai tersebut dimulai sejak tanggal 06 Januari 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2011 dan ibu Mawar meminjam uang kepada ibuk Mardiani sebesar Rp 5.000.00,-.

Berdasarkan sistem pengembalian atau pembayaran pinjaman gadai tersebut dengan cara cicil selama 12 bulan. Barang sebagai jaminan utang tersebut berupa sertifikat tanah. Transaksi akad gadai ini ibu Mawar sebagai orang pemberi gadai (*Rahin*) melakukan akad gadai bersyarat yaitu apabila utang yang ada telah jatuh tempo pembayaran, sertifikat tanah yang ada kepada ibu Mardiani yang telah digadaikan oleh ibu Mawar tidak boleh dijual.

Mengenai transaksi gadai ini ibu Mardiani sebagai orang yang menerima barang gadaian merasa dirugikan karena ibu Mawar pada masa pembayarannya lewat dari tanggal yang telah ditentukan selama 1 bulan 2 minggu. Karena akad gadai bersyarat tersebut ibu Mardiani tidak bisa menjual barang gadaian, ibu Mardiani tidak mengetahui bahwa waktu pembayaran selama itu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak orang yang melakukan transaksi gadai yaitu ibu Mardiani sebagai pihak

murtahin (orang yang menerima barang gadai). Ia mengatakan bahwa ia merasa dirugikan dengan transaksi akad gadai bersyarat tersebut.⁵⁴

Kasus ketiga: Hasil wawancara dengan bapak Nasar sebagai orang yang memberi barang gadai (*Rahin*) dengan usia 40 tahun yang bertempat tinggal di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Bapak Nasar yang telah melakukan akad gadai bersyarat kepada ibu Linda Lestari sebagai *Murtahin* (penerima barang) dengan usia 37 Tahun yang bertempat tinggal di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, dan transaksi gadai tersebut dimulai sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 dan bapak Nasar meminjam uang kepada ibu Linda Lestari sebesar Rp 5.500.00,-.

Berdasarkan sistem pengembalian atau pembayaran pinjaman gadai tersebut dengan cara cicil selama 8 bulan. Barang sebagai jaminan utang tersebut berupa sebuah sepeda motor. Transaksi akad gadai ini bapak nasar sebagai orang pemberi gadai (*Rahin*) melakukan akad gadai bersyarat yaitu apabila utang yang ada telah jatuh tempo pembayaran, ssepeda motor yang ada

⁵⁴ Ibu Mardiani, Pihak yang menerima gadai (*Murtahin*), Wawancara Pribadi 03.30 WIB, Desa Singkohor 2 Oktober 2019.

kepada ibu Linda Lestari yang telah digadaikan oleh bapak Nasar tidak boleh dijual.

mengenai transaksi gadai ini ibu Linda Lestari sebagai orang yang menerima barang gadaian merasa dirugikan karena bapak Nasar pada masa pembayarannya lewat dari tanggal yang telah ditentukan selama 3 bulan 1 minggu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak orang yang melakukan transaksi gadai yaitu ibu Linda Lestari sebagai pihak *murtahin* (orang yang menerima barang gadai). Ia mengatakan bahwa ia merasa dirugikan dengan transaksi akad gadai bersyarat tersebut.⁵⁵

Kasus keempat: hasil wawancara dengan bapak Rafa sebagai orang yang menggadaikan (*Rahin*), ia mengatakan bahwa ia pernah melakukan akad gadai bersyarat dan telah menggadaikan sepeda motor kepada bapak Ahmad sebagai orang yang menerima barang gadai (*Murtahin*). Bapak Rafa menerima pinjaman atas barang yang digadaikan sebesar Rp 5.000.000, untuk keperluan membuka usaha foto copy.

⁵⁵ Ibu Linda Lestari, Pihak yang menerima gadai (*Murtahin*), Wawancara Pribadi 09.30 WIB, Desa Singkohor 3 Oktober 2019.

Mengenai hal ini bapak Rafa melakukan akad gadai bersyarat dengan menggadaikan sepeda motor kepada bapak Ahmad. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rafa yang telah melakukan akad gadai bersyarat, karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang mumalah khususnya mengenai *Rahn* (gadai), karena kurangnya pengetahuan ini maka terjadilah praktek gadai bersyarat yang tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad sebagai orang yang menerima barang gadai (*Murtahin*), ia mengatakan bahwa ia pernah melakukan akad gadai bersyarat kepada bapak Rafa tetapi bukan ia yang melakukan atau mengajukan akad gadai bersyarat tetapi bapak Rafa yang telah melakukan akad tersebut. Bapak Rafa telah menggadaikan sepeda motor kepada bapak Ahmad sebagai orang yang menerima barang gadai (*Murtahin*). Karena Bapak Rafa menerima pinjaman atas barang yang digadaikan sebesar Rp 5.000.000, untuk keperluan membuka usaha foto copy.⁵⁷

Praktek akad gadai bersyarat yang dilakukan oleh bapak Rafa sebagai orang yang memberi barang gadai (*Rahin*) dengan usia 39 tahun yang

⁵⁶ Bapak Rafa, Pihak yang pemberi gadai (*Rahin*), Wawancara Pribadi 02.30 WIB, Desa Singkohor 4 Oktober 2019

⁵⁷ Bapak Ahmad, Pihak yang menerima gadai (*Murtahin*), Wawancara Pribadi 09.00 WIB, Desa Singkohor 4 Oktober 2019

bertempat tinggal di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Bapak Rafa yang telah melakukan akad gadai bersyarat kepada bapak Ahmad sebagai *Murtahin* (penerima barang) dengan usia 38 Tahun yang bertempat tinggal di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, dan transaksi gadai tersebut dimulai sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 dan bapak Rafa meminjam uang kepada bapak Ahmad sebesar Rp 5.000.00,-.

Berdasarkan sistem pengembalian atau pembayaran pinjaman gadai tersebut dengan cara cicil selama 11 bulan. Barang sebagai jaminan utang tersebut berupa sebuah sepeda motor. Transaksi akad gadai ini bapak Rafa sebagai orang pemberi gadai (*Rahin*) melakukan akad gadai bersyarat yaitu apabila utang yang ada telah jatuh tempo pembayaran, sepeda motor yang ada kepada bapak Ahmad yang telah digadaikan oleh bapak Rafa tidak boleh dijual.

Mengenai transaksi gadai ini bapak Ahmad sebagai orang yang menerima barang gadaian merasa dirugikan karena bapak Nasar pada masa pembayarannya lewat dari tanggal yang telah ditentukan selama 2 bulan 3 minggu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan imam Rijal⁵⁸ yaitu: imam Rijal mengatakan bahwa seharusnya akad gadai bersyarat tidak boleh dilakukan oleh orang-orang khususnya di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, dikarenakan dilihat dari sistemnya itu bisa merugikan salah satu pihak, tentu akadnya itu batal dan tidak sah karena mensyaratkan sesuatu yang bisa merugikan. Ia juga mengatakan mungkin masyarakat di Desa Singkohor tersebut kurangnya pengetahuan tentang agama terutama masalah *Rahn* (gadai).

1. Pendapat masyarakat terhadap praktek gadai bersyarat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil

Allah menciptakan saling tolong menolong antar manusia dengan manusia lainnya yaitu dengan cara bermuamalah, prinsip muamalah adalah bentuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Salah satu bentuk muamalah yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil adalah gadai. Gadai atau disebut dengan *Rahn* adalah menjadikan suatu benda yang bernilai sebagai tanggungan utang.

⁵⁸ Imam Rijal, Tokoh agama, Wawancara Pribadi 12.00 WIB, Desa Singkohor 5 Oktober 2019

Berdasarkan praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Singkohor adalah tidak sah, yang dimana pada saat melakukan transaksi akad gadai salah satu pihak melakukan akad gadai bersyarat yang dapat merugikan salah satu pihak, yang dimana *Rahin* sebagai orang berutang melakukan akad gadai bersyarat yaitu apabila utang yang ada telah jatuh tempo maka barang gadaian tersebut tidak boleh dijual oleh *Murtahin* sebagai orang yang menerima barang gadai.

Menurut dari hasil survei yang penulis lakukan, mengenai akad gadai bersyarat, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa tersebut tidak mengetahui bahwa akad gadai bersyarat itu tidak sah dilakukan. Karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu *Rahin*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu: hasil wawancara dengan bapak ilhamdi⁵⁹ ia mengatakan bahwa akad gadai bersyarat tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena dilihat dari sistemnya bisa merugikan, tetapi sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Singkohor. Mereka melakukan akag gadai bersyarat agar barang jaminan tersebut kembali lagi kepada mereka. Ia juga mengatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa

⁵⁹ Bapak Ilhamdi, Masyarakat Setempat, Wawancara Pribadi 15.00 WIB, Desa Singkohor 5 Oktober 2019.

akad gadai bersyarat tidak sah menurut Wahbah az-Zuhaili dan tidak sesuai dengan syari'at islam.

Kebanyakan warga atau masyarakat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil tidak tahu hukum gadai bersyarat yaitu tidak sah dan akadnya batal.

D. Analisa Terhadap Praktek Gadai Bersyarat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Aceh Singkil

Dalam kehidupan manusia yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohaninya saja tetapi kebutuhan jasmani, untuk memenuhi kebutuhan harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitar seperti jual beli, gadai, pinjam meminjam dan sebagainya. Dalam bermuamalah kapanpun dan dimana pun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁶⁰

Salah satu bentuk mumalah yang sering dilakukan masyarakat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil adalah gadai. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat adalah akad gadai bersyarat, dimana pihak *rahin* mensyaratkan sesuatu yang dapat merugikan pihak *Murtahin*.

⁶⁰ *Ibit*, Fiqih Muamalah, h. 15.

Hukum gadai bersyarat menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili adalah sebagai berikut:

الشرط المفسد للعقد وهو ان يشترط ما يضر المرتهن كشرط الا يبيعه بعد حلول اجل وفاء الدين الا بعد شهر او الا يبيع باكثر من ثمن المثل⁶¹

Artinya: “Syarat yang tidak sah sekaligus akad ar-Rahnu yang ada ikut menjadi tidak sah. Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak al- Murtahin, seperti mensyaratkan pihak Murtahin tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang yang ada telah jatuh tempo. Sedangkan pihak ar-Rahin belum juga membayar utang yang ada kecuali setelah satu bulan misalnya.

Penjelasan hukum pada praktek akad gadai bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Wahbah Az-Zuhali jelas berpendapat tidak sah melakukan akad gadai tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak yang melakukan praktek transaksi gadai dari kasus pertama hingga kasus keempat, bahwa transaksi gadai yang dilakukan di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil , masyarakat tersebut telah melakukan akad gadai bersyarat. Masyarakat tersebut bukan melakukan transaksi gadai kepada

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, juz V, h. 120.

lembaga penggadaian atau bank, akan tetapi masyarakat tersebut melakukan transaksi gadai kepada perorangan saja yaitu sesama masyarakat desa tersebut.

Menurut penulis terkait dengan praktek gadai bersyarat di atas, bahwa masyarakat pada umumnya termasuk awam dalam pemahaman tentang pelaksanaan gadai khususnya tentang gadai bersyarat yang sesuai dengan ajaran syari'at islam yang dimana masyarakat Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil masih membutuhkan pendidikan yang terkait dengan muamalah untuk dapat menghindari masyarakat melakukan transaksi gadai yang tidak sesuai dengan syari'at islam yang telah diajarkan.

Masyarakat juga harus belajar tentang batasan-batasan hukum supaya kegiatan transaksi gadai bersyarat tersebut bisa terhindar, sehingga peneliti merasa bahwa masyarakat perlu untuk mengetahui tentang pelaksanaan gadai yang sesuai dengan syari'at islam dan pendapat Wahbah az-Zuhaili.

Dengan demikian bahwa jelaslah pelaksanaan gadai di atas tersebut tidak sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili, sebab akad gadai bersyarat tidak boleh dan transaksi tersebut tidak sah karena dapat merugikan salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai pembahasan skripsi ini, penulis berusaha untuk mengemukakan dalam bab penutup ini dengan kesimpulan dari penjelasan beberapa bab sebelumnya yaitu:

3. Berdasarkan pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil adalah masyarakat tersebut melakukan akad gadai bersyarat yang dimana akad gadai tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu orang yang menerima barang gadaian (*Murtahin*). Pihak *ar-Rahin* melakukan transaksi akad gadai bersyarat seperti mensyaratkan apabila utang yang ada telah jatuh tempo utang yang ada belum dibayar maka barang jaminan tidak boleh dijual. Karena kurangnya pengetahuan tentang muamalah khususnya masalah gadai, maka terjadilah akad gadai bersyarat tersebut.
4. Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, telah dikemukakan bahwa syarat gadai yang sah adalah tidak boleh saling merugikan salah satu

pihak. Di mana masyarakat Desa Singkohor Kecamatan Singkohor melakukan praktek transaksi akad gadai bersyarat tersebut Maka syarat seperti ini tidak sah dan akadnya batal. Karena syarat tersebut bertentangan apa yang dikehendaki oleh akad.

5. Masyarakat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor yang melakukan transaksi akad gadai bersyarat yaitu apabila utang yang ada telah jatuh tempo utang yang ada belum dibayar maka barang gadai tidak boleh dijual oleh si pemberi utang. Masyarakat di Desa Singkohor melakukan akad gadai bersyarat tersebut agar barang jaminan bisa kembali kepada mereka yang menggadaikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa saran yang harus dibenahi yaitu:

1. Kepada kepala Desa ataupun yang lainnya yang terkait hendaknya lebih aktif dalam acara keagamaan seperti mengadakan kajian rutin tentang fiqh klasik dan fiqh modern ditengah masyarakat agar pemahaman masyarakat tentang hukum islam selalu berkembang.
2. Kepada tokoh agama, para ustaz maupun da'i agar lebih aktif memberikan arahan, menyampaikan hukum islam yang berkembang

khususnya perkembangan tentang *Rahn* (gadai) modern sehingga pemahaman masyarakat tentang islam semakin kuat. Karena pendalaman agama insyaAllah akan semakin mudah dalam menjalankannya.

3. Kemudian kepada seluruh masyarakat agar menyadari betapa pentingnya mengetahui tentang gadai, dari hasil pelaksanaan tersebut akan sangat membantu saudara kita yang kurang tahu.

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan acana pemikiran dalam hukum islam dan semoga bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang terlibat dalam menegakan hukum Allah di bumi ini. Akhirnya kepada Allah penulis kembalikan segalanya. Mudah-mudahan penulisan ilmiah ini dapat mengundang ridha Allah SWT., dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syari'ah* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2007.

-----, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, jujuj VI* Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.

Asy-Syaukani Muhammad, *Nail al-Autar*, Jaz V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Amin Ghofur Saiful, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Abdullah Syekh Azis Syawisy, *Islam Agama Yang Fitrah*, Jakarta: Bumi Aksara 1994.

Abdullah Hafid, *Kunci Fikih Syafi'I*, Semarang: CV As-Syifa', 1992.

Ar-Ramli Syihabuddin, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

An-Nawawi Imam, *Kitab Al-Majmu' Sarah Majahib*, Jilid XII, t.th.

Abu Bakar Jabir Syekh, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, cet. VI, Madinah: Maktabatul 'Ulum wa Hikam, 1419.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang Dan Gadai*, cet. Ke II Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Boko, Cholid Nur dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Dana Karya, 2004.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

- , *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajar, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz, *Bulughul Maram*, Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Halabiy, 752 H
- Lisa Rahayu, “*Makna Qoulannya dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az-Zuhaili*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Usuluddin Universitas Uin Suska Riau, Pekanbaru, 2010.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syari’ah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- , *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Mas’adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Kolektual* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *fiqh Muamalah*, Jakarta Timur: Amzah, 2010
- Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’i Abu Abdullah, *Al-Umm*, jilid III, t.th.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Najieh Abu Ahmad, *Fiqh Mazhab Syafi’i*, cet. 1, Bandung: Marja, 2017.
- Pasal 3 undang-undang Nomor 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional, Jakarta: CV. Medya Duta, 2003.
- Saton, Djam’an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafe’i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Sabiq Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar as-Saqafah al-Islamiyah, t.th.

Soemitra Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Zuhri Moh. Dkk, *Fikih Empat Majhab*, cet.I, Semarang: CV. Asy Syifa, 1994

B. Dokumen

Sumber data statistik di kantor Desa Singkohor Tahun 2019

C. Hasil wawancara

Bapak Muslim, Pihak yang menerima gadai (*Murtahin*), Wawancara Pribadi, Desa Singkohor 1 Oktober 2019.

Ibu Mardiani, Pihak yang menerima gadai (*Murtahin*), Wawancara Pribadi, Desa Singkohor 2 Oktober 2019.

Ibu Linda Lestari, Pihak yang menerima gadai (*Murtahin*), Wawancara Pribadi 09.30 WIB, Desa Singkohor 3 Oktober 2019.

Bapak Rafa, Pihak yang pemberi gadai (*Rahin*), Wawancara Pribadi, Desa Singkohor 4 Oktober 2019.

Bapak Ahmad, Pihak yang menerima gadai (*Murtahin*), Wawancara Pribadi, Desa Singkohor 4 Oktober 2019.

Imam Rijal, Tokoh agama, Wawancara, Desa Singkohor 5 Oktober 2019

Bapak Ilhamdi, Masyarakat Setempat, Wawancara Pribadi, Desa Singkohor 5 Oktober 2019.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Sahriani, lahir di Desa Lae Butar pada tanggal 12 Oktober 1995. Putri kedua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Alamin Bancin dan Nurbayani. Penulis tinggal di Desa Mukti Jaya kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat menjalankan pendidikan penulis bertempat tinggal di Jln. Sukarela Timur, Gg. Zaat laud dendang kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Jenjang pendidikan penulis di awali pada Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Kampung Baru, Beralamatkan Kampung Baru Kecamatan Gosong Telaga pada Tahun 2003 sampai 2008. Selanjutnya penulis masuk Pesantren Darul Muta'alimin Tanah Merah Aceh Singkil, dari Tahun 2008 sampai dengan 2014.

Pada masa pendidikan perkuliahan dari Tahun 2014 penulis aktif mengikuti perkuliahan dan kegiatan Mahasiswa yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Medan, 11 November 2019

Sahriani